



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

CHANDI 2025: LANGKAH INDONESIA MENJADI PUSAT DIPLOMASI BUDAYA DUNIA

Fieka Nurul Arifa

Analisis Legislatif Ahli Muda

fieka.arifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Kebudayaan RI menggelar forum kebudayaan internasional *Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovation* (CHANDI) 2025 di Denpasar, Bali, pada 3–5 September 2025. Mengusung tema “*Culture for the Future*”, forum ini membahas isu-isu strategis terkait pelestarian warisan budaya, diplomasi budaya, pembiayaan untuk masa depan kebudayaan, penguatan aksi iklim berbasis budaya, serta inovasi dalam bidang seni dan media. CHANDI 2025 melibatkan delegasi berbagai negara, termasuk perwakilan menteri kebudayaan, duta besar, akademisi, dan seniman.

Melalui CHANDI 2025, Indonesia tidak hanya tampil sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai penggagas dalam merumuskan peran budaya pada geopolitik abad ke-21 sebagai upaya mendukung cita-cita Indonesia menjadi pusat diplomasi budaya dunia. Untuk itu Indonesia mengambil langkah strategis. *Pertama*, Indonesia memperluas jejaring internasional melalui diplomasi bilateral di sela forum, misalnya dengan Inggris, Yordania, Rwanda, Suriah, dan Libya. Pertemuan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merumuskan langkah konkret seperti pertukaran seniman, kolaborasi pendidikan, pengembangan warisan budaya bersama, hingga penguatan sektor kreatif lintas negara.

Kedua, Indonesia mengusulkan pendekatan lintas isu melalui usulan mengaitkan budaya dengan pembangunan berkelanjutan, mitigasi krisis global, dan etika teknologi. Dalam konteks global saat ini, diplomasi tidak hanya membahas tentang kekuatan militer atau ekonomi, melainkan juga kapasitas memengaruhi cara dunia memandang nilai dan identitas. Melalui deklarasi yang disepakati, Indonesia menawarkan narasi bahwa budaya bukan warisan statis, melainkan modal strategis untuk perdamaian, inovasi, dan inklusi sosial.

Ketiga, Indonesia menunjukkan kepemimpinan normatif di kancah internasional. Dalam pertemuan tingkat menteri pada Rabu, 3 September 2025 dihasilkan deklarasi bersama *Bali Cultural Initiative Declaration 2025* yang diadopsi secara mufakat oleh 35 dari 40 negara yang hadir. Ke-35 negara tersebut meliputi Albania, Aljazair, Armenia, Bangladesh, Belarusia, Belgia, Brunei Darussalam, Bulgaria, Kamboja, Fiji, Georgia, Italia, India, Indonesia, Iran, Yordania, Laos, Libya, Malaysia, Mongolia, Oman, Pakistan, Palestina, Rusia, Rwanda, Serbia, Singapura, Siprus, Suriah, Tanzania, Thailand, Tunisia, Republik Uzbekistan, Venezuela, dan Zimbabwe.

Bali Cultural Initiative Declaration 2025 menyoroti lima isu utama, yaitu (1) budaya sebagai pilar pembangunan berkelanjutan, dengan pengetahuan tradisional dan kreativitas terintegrasi ke dalam kebijakan iklim dan konservasi hayati; (2) diplomasi budaya sebagai jembatan perdamaian, melalui pertukaran seniman, pemuda, akademisi, dan pelaku budaya lintas negara; (3) inovasi digital untuk pelestarian budaya, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan yang etis serta perlindungan hak kekayaan intelektual; (4) pemberdayaan generasi muda dan penguatan industri kreatif berbasis komunitas; dan (5) pelestarian warisan budaya sebagai tanggung jawab

global dengan mencegah perdagangan ilegal artefak dan mendukung repatriasi. Deklarasi tersebut memperlihatkan kepercayaan dunia terhadap kemampuan Indonesia untuk membangun konsensus internasional, bahkan di tengah meningkatnya polarisasi politik global.

Terakhir, Indonesia berupaya menjadikan CHANDI sebagai forum berkelanjutan untuk menciptakan *soft power ecosystem* yang dapat menjadi rujukan diplomasi budaya di Asia dan dunia. Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menegaskan bahwa budaya bukan sekadar cerminan masa lalu, melainkan alat kuat untuk diplomasi dan pembangunan perdamaian, kemudian melanjutkannya dengan semangat kolaborasi global untuk masa depan bersama.

Atensi DPR

DPR RI berperan strategis dalam mendukung diplomasi budaya Indonesia yang diinisiasi melalui CHANDI 2025. Melalui fungsi legislasi Komisi X DPR RI dapat memperkuat dasar hukum pengelolaan diplomasi budaya lintas sektor dan lintas negara. Melalui fungsi penganggaran, Komisi X DPR RI dapat berperan memastikan pendanaan keberlanjutan forum serta program-program turunannya, termasuk beasiswa kebudayaan, digitalisasi warisan budaya, dan kerja sama riset internasional. Selanjutnya, melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI dapat memastikan agar pelaksanaan diplomasi budaya sejalan dengan kepentingan nasional, prinsip keberlanjutan, dan inklusivitas. Dukungan politik DPR RI juga krusial dalam memperluas jejaring diplomasi, memastikan bahwa langkah strategis Indonesia di panggung budaya global mendapatkan legitimasi dan dukungan, sehingga menjadikan Indonesia semakin siap memimpin percakapan dunia mengenai masa depan kebudayaan global.

Sumber

detik.com, 3, 4, dan 5 September 2025;
en.antaranews.com, 3, 4, dan 5 September 2025;
liputan6.com, 6 September 2025;
nasional.sindonews.com, 5 September 2025;
rri.co.id, 3 September 2025; dan
voi.id, 3 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*